

TAK BOLEH LEBIH DARI 50 TAHUN

Usia Personel Pengamanan Pemilu 2024

JAKARTA (KR) - Polri membuat kebijakan terkait pembatasan usia personel yang terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024, yakni berumur tidak boleh lebih dari 50 tahun dan dalam kondisi kesehatan baik.

Kebijakan tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam webinar tentang peningkatan kompetensi Polwan dalam rangka HUT ke-75 Polwan bertajuk 'Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju', Selasa (29/8). "Kami buat kebijakan untuk Pemilu 2024, anggota-anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan di TPS itu harus memiliki catatan kesehatan yang

memadai dan usianya tidak boleh di atas 50 tahun," kata Dedi.

Kebijakan pembatasan usia itu belajar dari pengalaman saat Pemilu 2019, di mana 30 personel pengamanan Polri mulai dari jenjang kepengkatan perwira tinggi hingga perwira tingkat pertama meninggal dunia karena kelelahan dengan rangkaian pemilu yang panjang dan lama.

Dari hasil analisis yang dilakukan, Dedi mengatakan, personel pengamanan yang meninggal dunia saat Pemilu 2019 itu rata-rata berusia di atas 50 tahun. Selain itu, ditambah pula ada beberapa personel yang tidak melakukan pengecekan kesehatan.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal serupa terjadi pada Pemilu 2024, Polri

menetapkan peraturan, personel yang terlibat pengamanan di TPS Pemilu 2024 harus sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan berusia maksimal 50 tahun.

Dedi pun menggelar rapat dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri dan Biro Perawatan Personel (Watpres) SDM Polri untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena yang terjadi saat Pemilu 2019 lalu.

"Memang, sebagian besar yang meninggal dunia, saya melihat, komposisi kepengkatannya itu dari pangkat bintang dua sampai perwira pertama. Untuk Bintara, ada beberapa orang yang sebagian besar meninggal dunia di Pemilu 2019 usianya di atas 50 tahun," jelasnya.

(Ant/Obi)-d

Sosialisasikan

"Harapannya Danais bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi di wilayah Kota Yogyakarta hingga tingkat kelurahan," ujarnya.

Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, Purwanto Budi Santosa selaku civil society dan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Menurut Purwanto, 93 persen di Kalurahan Brontokusuman dan Jetis masuk dalam Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Sumbu Filosofi. Bahkan di Bumijo 100 persen masuk dalam Kawasan SRS Sumbu Filosofi. Artinya mereka dapat mengajukan Danais, khususnya urusan tata ruang, kebudayaan dan pertanian. "Masyarakat Kota Yogyakarta mungkin secara langsung belum pernah merasakan Danais. Tapi secara tidak langsung, sudah. Contohnya

Pemkot Yogyakarta telah merevitalisasi Pasar Prawirotaman dan itu menggunakan Danais. Tahun ini Pemkot melakukan revitalisasi Pasar Sentul," jelasnya.

Selama ini sebagian besar Danais lebih dimaksimalkan untuk fasilitas umum. Dengan mempertimbangkan sejauh mana tingkat mana yang paling mendasak.

Ketua Komisi A DPRD DIY tidak menampik jika belum semua kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi oleh Danais. Pengamanan sampah contohnya. Bisa dibilang dibandingkan empat kabupaten di DIY, permasalahan sampah di Kota Yogyakarta termasuk paling kompleks.

Dan tidak dipungkiri, sejauh ini anggarannya sangat kecil. Bahkan terkesan diserahkan kepada masyarakat. "Mereka mengolah secara mandiri tanpa

adanya dukungan fasilitas. Kami dari DPRD DIY sudah pernah mengusulkan agar tiap bank sampah difasilitasi mesin pencacah sampah. Jadi, tidak sebatas imbauan memilah sampah saja. Tapi juga harus ada dukungan fasilitas," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Suwanto juga menanggapi pernyataan dari peserta sosialisasi tentang kemungkinan Danais untuk melestarikan bahasa daerah. Karena menurut mereka, sejauh ini Danais lebih ke fisik dan kesenian saja. Padahal melestarikan bahasa Jawa juga tidak kalah penting.

"Untuk bahasa Jawa itu kewenangannya ada di Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sejauh ini ada kursus atau pelatihan yang dapat diakses masyarakat. Mulai dari usia dini hingga dewasa," jelasnya. (Awh)-f

Sambungan hal 1

Tidak

Menurutnya, sudah ada tahapan pemilu untuk mengajak masyarakat memilih bakal capres yang diusung itu dapat dilakukan pada saat kampanye. Untuk itu, katanya, kepala daerah yang menjadi kader partai politik bila ikut kampanye diwajibkan untuk cuti dari jabatan kepala daerah ataupun pejabat negara. "Kalau mengajak nanti di kampanye silahkan. Nunggu waktunya, kalau kepala daerah harus cuti, itu ada batasannya. Kalau kepala negara juga demikian cuti dan lain-lain," jelasnya.

Bagja berharap imbauan tersebut dapat dipatuhi semua pejabat daerah dan pejabat negara yang mempunyai afiliasi terhadap peserta pemilu tertentu. Terkait video Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang mengajak memilih bakal capres Ganjar Pranowo dari PDIP, Bagja mengatakan, pihaknya sedang memproses dugaan pelanggaran tersebut.

Ia menyebut tengah mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi

unsur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang tentang Pemilu, sebab bukan hanya Gibran yang ada di dalam video tersebut, tetapi ada banyak kepala daerah.

Menurut Bagja, dugaan pelanggaran tersebut sudah diproses di Surakarta. Ada dua video yang diproses, siapa saja kepala daerah yang ada di dalam video tersebut, selain Gibran dan Bobby. "Jika terbukti melanggar, ada sanksi yang diberlakukan mulai dari administratif sampai pelanggaran pidana," katanya.

Namun, pihaknya belum mengarah pada sanksi karena masih dalam proses dugaan pelanggaran. Seperti diketahui, beredar video Gibran dan Bobby melakukan aktivitas penempelan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo di rumah-rumah warga beberapa waktu lalu.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan penempelan stiker sudah sesuai izin dari pemilik rumah dan penempelan stiker itu dilakukan

sebagai sosialisasi bakal capres Ganjar kepada warga.

Pada bagian lain anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar tidak ragu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar aturan. "Copot APK itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu sebagai salah satu simbol penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu," ujarnya.

Menurut Totok, tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai pengingat kepada peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku. Salah satunya Perbawaslu No 33/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No 26 tahun 2003 tentang Keterbukaan, Kebersihan dan Keindahan (K3), Perbup No 3/2016 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. (Ant/Ob)-f

Sambungan hal 1

Haji

Bahkan, dalam masa tunggu yang lama itu terbersit kenaikan biaya haji dengan berbagai pertimbangan yang mendasarinya. Karenanya, evaluasi manajemen pelaksanaan ibadah haji setiap tahun menjadi penting. Tidak saja demi meningkatkan kualitas pelayanan tapi juga untuk mereduksi angka kematian jemaah haji.

Haji memang menjadi hak asasi bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Berarti tidak boleh ada pembatasan bagi siapapun untuk menjadi jemaah haji. Realita ini selaras dengan tuntutan dan ajaran agama bahwa haji hanyalah bagi yang mampu. Fakta ini memberikan isyarat bahwa persepsi mampu bukan sekadar mampu finansial saja tapi juga mampu secara fisik yang pastinya berkaitan dengan kesehatan.

Pertimbangan kesehatan secara tidak langsung berkaitan dengan usia. Fakta jemaah haji di musim 2023 temyata 43,78% jemaah dari 22.900 jemaah berusia lebih 60 tahun dan jemaah> Indonesia yang meninggal 774

orang atau 3,38% dan mayoritas lansia. Fakta ini harus dicermati karena rentang

usia ternyata rawan dan riskan terhadap kesehatan di pelaksanaan ibadah haji. Apalagi pelaksanaan haji bukanlah ibadah yang mudah. Karena ada tahapan dan tuntutan yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental.

Wacana pembatasan ibadah haji hanya sekali pada dasarnya juga menguatkan keadilan. Karena semua calon jemaah haji akhirnya akan bisa melaksanakan secara khidmat untuk mengejar perolehan predikat haji mabrur. Terkait ini, betapa ibadah haji menjadi suatu peluang dan tantangan. Peluang karena rentang masa tunggu yang lama memberi celah untuk penyalahgunaan dengan modus *cuan*. Di sisi lain tantangan manajemen ibadah haji tentu dimaklumi karena jumlah jemaah yang sangat besar.

Indonesia sudah menjadi prioritas dalam kuota haji yang dikeluarkan Arab Saudi. Bahkan berbagai cara dan lobi selalu dilakukan untuk meningkatkan kuotanya demi percepatan masa tunggu. Mengacu Keputusan Menteri Agama no.189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia 1444 H / 2023 M bahwa kuota haji berjumlah 221.000. Ironisnya,

meskipun kuota terus bertambah tetapi waktu tunggu semakin lama dan yang tercepat di Kabupaten Maluku Barat Daya (11 tahun) dan terlama Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan (47 tahun). Untuk Jawa misalnya DKI Jakarta mencapai 28 tahun (kuota 7.439 jemaah), Jawa Tengah 32 tahun (kuota 28.494 jemaah), Yogyakarta 33 tahun (kuota 2.592 jemaah) dan Jawa Timur 35 tahun (kuota 33.035 jemaah).

Fakta dibalik penambahan kuota melalui ragam lobi ternyata masih belum dapat mengurai masa tunggu yang lama. Hal ini berdampak sistemik terhadap manajemen pelayanan ibadah haji, termasuk tentu risiko dari keberangkatan para lansia dalam menjalankan ibadah haji. Menjadi logis jika kemudian muncul wacana untuk melakukan pembatasan haji hanya sekali. Ini tidak lain dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kemaslahatan. Sehingga ada kesempatan bagi semua calon jemaah haji untuk bisa berangkat dan beribadah di tanah suci. Dan bisa mendapatkan predikat haji mabrur. (Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta)-f

Sambungan hal 1

DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Energi Berkelanjutan Jadi Pilar Utama

YOGYA (KR) - Kehidupan manusia saat ini masih sangat bergantung pada minyak dan gas bumi (migas) sebagai sumber energi. Keberlanjutan penyediaan energi menjadi tanggung jawab bersama, antara Pemerintah, perusahaan, badan usaha, serta para profesional. Selain energi migas, masyarakat juga perlu memikirkan penggunaan energi berkelanjutan untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060.

"Energi berkelanjutan adalah konsep penting yang harus menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya energi kita. Konsep ini menyuarakan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi saat ini dengan perlindungan lingkungan dan kesinambungan bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks produksi minyak dan gas bumi, perlu adanya transformasi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan," kata Gubernur DIY Sri

Sultan Hamengku Buwono X dalam pembukaan Forum Fasilitas Produksi Migas (FF-PM) Indonesia di Marriott Hotel Yogyakarta, Selasa (29/8).

Sultan mengatakan, Yogyakarta telah mengembangkan berbagai inisiatif serta mengaplikasikan energi berkelanjutan. Pasar Buah Gamping sejak lima tahun yang lalu telah memanfaatkan sampah buah busuk menjadi energi listrik dengan teknologi yang diadopsi dari Swedia. Selain itu Pemerintah Pusat juga mendirikan Baron Technopark di Kabupaten Gunungkidul, sebagai pusat penelitian pemanfaatan energi terbarukan, dimana riset pemanfaatan angin dan matahari sebagai sumber tenaga pembangkit listrik terus dilakukan. Bahkan, belum lama ini, Pemda DIY menyelesaikan dan meresmikan pemanfaatan energi matahari dalam upaya mengatasi kebutuhan air warga Gunungkidul, disebut sebagai Sistem Pompa Air Tenaga Surya (SPATS). (Ria)-d

Pengemudi

Adapun proses pembahasan rencananya dilakukan September 2023.

Sementara itu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana mengungkapkan, Pemda DIY akan menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) terkait penyeragaman tarif ojol. Kebijakan itu diambil pas-capertemuan dengan ratusan pengemudi ojol. Nantinya Pemda akan melibatkan para ojol untuk merumuskan sejauh mana batas atas dan bawah tarif ojol agar bisa saling menguntungkan.

"Kami sepakat untuk *bareng-bareng* rembulan mencari titik keseimbangan kepentingan *kanca-kanca* ojol, kepentingan aplikasi *platform on demand* dan konsumen," ujar Tri Saktiyana.

Koalisi

Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku akan melaporkan ke partai terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut. "Ya, saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya gak tahu. Saya akan lapor ke partai dulu," kata Cak Imin.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB resmi membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022. Dalam piagam itu, salah satu poin perjanjian nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dua partai itu telah mendukung Prabowo

Sambungan hal 1

Menurut Tri, sesuai dengan Keputusan Kementerian Perhubungan (KP) No 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022, Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab untuk menentukan tarif batas atas dan akhir dari ojol. Oleh karena itu, Pemda mengajak sejumlah stakeholder untuk menyusun Pergub tersebut. Termasuk perwakilan ojol ikut terlibat untuk merumuskan Pergub yang akan dibuat, dengan aspirasinya bisa dengar.

"Daerah lain yang sudah menerapkan tarif batas bawah dan atas ojol juga akan diikutsertakan untuk memberikan masukan. Diantaranya, Pemprov Jatim serta Bangka Belitung. Kita lihat pelaksanaan di sana, kita tiru, kita modifikasi agar lebih sesuai dengan pelaksanaan di DIY," jelasnya. (Ria)-f

Sambungan hal 1

Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Walaupun demikian, dua partai belum menyepakati nama bakal calon wakil presiden (bacawapres). Kemudian, PAN dan Golkar pada 13 Agustus 2023 ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Nama koalisi pun berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju sebagaimana diumumkan Prabowo pada Senin (28/8) malam.

Terkait kelanjutan Piagam Sentul, Muhaimin belum dapat memberikan komentar. Muhaimin mengaku tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama itu. Terlepas dari itu, dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada partainya, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul. "Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya," katanya. (Ant/Has)-d

Pomdam

Tiga prajurit TNI, yang seluruhnya prajurit TNI Angkatan Darat (AD), yaitu Praka RM (anggota Paspampres RI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda), bersama seorang warga sipil berinisial ZSS (kakak ipar Praka RM), menculik, memeras, dan menganiaya Imam Masykur, seorang pemuda berusia 25 tahun hingga meninggal dunia.

Korban, yang merupakan perantau dari Aceh, diculik oleh para pelaku pada 12 Agustus 2023 di toko kosmetik yang dia jaga di daerah, Rempoa, Tangerang Selatan. Kepada korban dan warga sekitar, para pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Korban sebelum meninggal sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan Rp 50 juta.

"Proses hukum yang dilakukan Pomdam Jaya berawal dari laporan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023 terkait adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Setelah di-

Sambungan hal 1

lakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI kemudian dilimpahkan kepada Pomdam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari dalam jumpa pers yang sama. Pomdam Jaya sejauh ini telah menangkap tiga prajurit

TNI itu dan menahan mereka. Ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Pomdam Jaya saat ini juga masih berkonsultasi dengan oditur militer terkait penetapan pasal. Tim dari Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) juga turun untuk mengawal penanganan kasus tersebut. (Has)-d



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelambaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

Cerah ☀ Berawan ☁ Udara Kabur ☁ Hujan Lokal 🌧 Hujan Pelir 🌧

Frugal Living, Cara Hidup Hemat Capai Financial Freedom



Widhiyanti Kurnianingsih, SE, M.Akt.Ak., CA, CRA
Dosen Universitas Amikom Yogyakarta

tentunya mengatur gaya hidup hemat bisa menjadi pilihan bagi semua generasi saat ini. Apakah pernah mendengar istilah konsep gaya hidup frugal living? Model gaya hidup ini sedang ngetren banget loh di kalangan anak muda, karena ternyata memberikan dampak positif bagi pengatur keuangan sehari-hari.

ZAMAN sekarang, perkembangan perekonomian menjelang pemilu harga barang mulai naik, dari fashion hingga memiliki rumah, kendaraan nilainya sangat tinggi. Usaha untuk meraih dan mensiasatinya,

lebih jelas. Biasanya seseorang dengan kesadaran (mindful) menerapkan frugal living ini akan memilih memasak makanan sendiri di rumah daripada harus membeli di luar. Selain itu juga tidak terlalu mementingkan fashion atau update barang elektronik.

Namun, gaya hidup ini bukan berarti pelit loo...., kata hemat dibarengi dengan cermat, sehingga perilaku dan gaya hidup harus dengan sikap cermat sehingga bisa mencapai financial freedom atau kebebasan financial di usia tertentu. Jadi frugal living ini lebih menekankan tentang bagaimana memperoleh sesuatu dengan cara lebih murah, prinsipnya bahwa setiap pengeluaran sesuai

dengan value for money. Lalu bagaimana cara mencapai financial freedom melalui gaya frugal living? 1. Beli Barang Belanjaan Hemat Sesuai Budget Caranya dengan memanfaatkan discount atau promo-promo harga tertentu saat belanja, namun tidak mengabaikan kualitas walaupun didapat dengan harga murah. 2. Menabung untuk kebutuhan sesuai tujuan. Menggunakan uang sesuai dengan tujuan, Contohnya, ingin membeli sepatu baru. Tanyakan pada diri sendiri, apakah memang benar-benar sedang butuh sepatu baru? Dan apakah punya uangnya untuk beli sepatu baru? Jika kedua pertanyaan tersebut

jawabannya iya, maka boleh saja membeli sepatu tersebut. 3. Tidak termakan gengsi status sosial. Memenuhi gengsi merupakan perilaku yang bahaya banget, karena tujuan keuangan di masa depan jadi sulit tercapai, hanya untuk memenuhi status sosial yang memuaskan keinginan orang lain dengan memaksakan diri membeli barang yang tidak perlu. Maka sebaiknya tetap konsisten menampilkan jati dirimu apa adanya. Bukan memanipulasi gaya hidup dengan mengikuti gengsi. 4. Lakukan Budgeting Memang membuat repot, tetapi melakukan budgeting ini bisa menjadi pemandu untuk mengontrol pengeluaran bulanan. Coba

lakukan budgeting ini tiga bulan hingga 6 bulan pertama, maka lama kelamaan akan terbiasa, sehingga ke depannya pengeluaran untuk kebutuhan sudah lebih terorganisir dengan baik. 5. Menghemat di Rumah. Menghemat energi dan air di rumah dapat membantu tagihan bulanan. Matikan lampu dan listrik penerangan saat tidak digunakan, serta perbaiki kebocoran air. Memasak sendiri di rumah lebih murah dari pada makan di restoran. Demikian juga saat melihat benda rusak, usahakan perbaiki terlebih dahulu jangan langsung membeli yang baru. 6. Prioritaskan Menyisihkan Uang Penting untuk menetapkan jumlah dana

yang disisihkan untuk tabungan setiap bulannya, dengan memprioritaskan tabungan maka dapat merencanakan masa depan dengan baik. Menerapkan hidup hemat membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan, tetapi dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut maka dapat mengontrol pengeluaran, menghemat uang dan mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Yuk biasakan kita mulai cara hidup frugal living ini, dan mencontoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari semoga berhasil ya.....

